

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan arsitektur di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya akan selalu mengalami perubahan berdasarkan dimensi waktu yang mempengaruhinya, baik dari segi *langgam/style* bangunan, pola tatanan ruang bangunan, ataupun dari aspek fungsional yang dilingkupi oleh bangunan. Secara umum, esensi dari pengaplikasian karya-karya arsitektur tersebut masih mengambil contoh atau menduplikasi dari penerapan arsitektur berdasarkan objek bangunan kuno karya masa terdahulu. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa lampau, arsitektur bangunan tampil sebagai sebuah *masterpiece* yang didesain dengan penuh dedikasi tinggi dan mampu mempengaruhi kondisi arsitektur di kawasan sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri khas khusus pada kondisi bangunan kuno ini untuk lebih dihargai eksistensinya, yaitu dari aspek historis bangunan tersebut, dengan semakin lama usia bangunan tersebut berdiri maka akan semakin tinggi pula nilai sejarah yang terkandung dari bangunan tersebut. Demikian pula yang terjadi di Indonesia, utamanya pada periode perkembangan arsitektur kolonial Belanda selama era pendudukan Hindia Belanda yang telah berlangsung kurang lebih 350 tahun dan telah terintegrasi dengan sejarah berdirinya bangsa ini.

Bangunan peninggalan kolonial Belanda ini menjadi saksi bisu tentang bagaimana kehidupan pada masa lampau dijalankan serta pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada masa itu. Salah satu nilai penting dari keberadaan bangunan Kolonial Belanda ini adalah posisinya sebagai simbol dominasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang mengikat secara erat kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Karakteristik yang muncul pada bangunan peninggalan kolonial Belanda ini apabila ditinjau secara arsitektural memiliki ciri khas visual bangunan yang membedakannya dari karakteristik bangunan tradisional masyarakat Indonesia pada era tersebut, dan secara fungsional atau spasial memiliki maksud serta tujuan khusus yang mempengaruhi proses pendirian ataupun penataan bangunan tersebut.

### 1.1.1 Gedung Balai Kota Madiun sebagai bangunan berarsitektur kolonial Belanda di Madiun

Sejarah berdirinya suatu kota dapat diidentifikasi dari berbagai narasumber yang relevan, diantaranya adalah referensi yang bersumber dari riset sejarah, ataupun dari pengamatan terhadap kondisi berbagai bangunan bersejarah yang melingkupi kawasan kota tersebut. Bangunan tipe balai kota (*raadhuis* atau *gemeentehuis*) sebagai salah satu model bangunan pemerintahan baru yang mengambil alih fungsi kantor Asisten Residen (*Asistent Resident Huis*), muncul sebagai akibat dari perubahan sistem administratif pemerintahan kota berdasarkan ketentuan undang-undang desentralisasi (*decentralisatie wet*) yang dirintis sejak tahun 1903. Undang-undang ini pada prinsipnya ingin memberikan hak kuasa pada kota-kota yang telah ditentukan untuk memerintah kotanya sendiri secara otonomi di bawah pimpinan seorang Walikota dan dalam satu lingkup sistem administratif baru berupa kotamadya/*gemeente* (Handinoto, 2010:432). Realisasi dari kebijakan tersebut secara keseluruhan baru berjalan pada periode tahun 1920-an dan ditandai dengan perkembangan pembangunan yang signifikan di tiap kotamadya di Hindia Belanda. Pada periode tersebut, Indonesia mengalami proses transformasi menjadi wilayah perkembangan pembangunan yang pesat dari berbagai versi bangunan arsitektural kolonial Belanda kontemporer dan berbagai tema perencanaan kota yang diantaranya terpadu dengan elemen tradisi regional wilayah tersebut (Groll, 1988).

Dengan adanya undang-undang desentralisasi, banyak kotamadya (*gemeente*) di pusat kota-kota di Jawa yang mendirikan pusat pemerintahan baru, dengan mendirikan gedung-gedung bergaya arsitektur kolonial modern sebagai pusat kotanya dan dikembangkannya pembangunan aset pemerintahan seperti kantor Asisten Residen, balai kota, penjara kolonial, ataupun stasiun kereta api sesuai dengan apa yang disebut sebagai sistem penataan pada kota *Indisch*. Pemerintah kolonial Belanda ingin menunjukkan suatu citra modern yang terlepas dari pengaruh tradisional Jawa, yang identik dengan posisi alun-alun sebagai pusat kota dan bangunan pemerintahan aparaturnya di sekelilingnya (kantor kabupaten, masjid, dan sebagainya).

Gill (1995), membagi morfologi kota *Indisch* tersebut menjadi 2 bagian, yang pertama adalah "*Oud Indische Stad*", yaitu sebuah kota di mana pada pusat kotanya (daerah alun-alun), terdapat pemisahan antara pemerintahan kolonial Belanda (yang diwakili oleh Residen atau Asisten Residen) dengan gedung pemerintahan Pribumi (yang diwakili oleh Bupati). Jadi pada hakekatnya gedung pemerintahan yang mengatur kota dalam satu kota terpisah satu sama lain. Pola penempatan pada morfologi ini biasanya ditandai dengan

penempatan gedung pemerintahan Pribumi di sisi selatan alun-alun, sedangkan kantor Asisten Residen ada di bagian lain dari kota tersebut. Sedangkan tipe morfologi “*Nieuwe Indische Stad*” adalah sebuah tatanan kota *Indisch* dimana pusat pemerintahan Pribumi (Kabupaten) dengan pusat pemerintahan kolonial Belanda (kantor Asisten Residen) ataupun fasilitas pendukung lainnya seperti halnya penjara, tempat ibadah, gedung *Societiet* (hiburan), serta pemukiman etnis tertentu ada di sekeliling kawasan alun-alun kota.

Konsep tersebut merupakan evolusi dari tatanan kota kolonial Belanda tahun 1800 hingga 1900. Menurut Handinoto (2010:293-300), identitas kota-kota kolonial di Jawa antara tahun 1800 sampai tahun 1900 memiliki ciri khas khusus, yaitu alun-alun kota sebagai pusatnya dengan bentuk kota yang disesuaikan dengan kepentingan ekonomi pihak Kolonial Belanda dimana produksi pertanian dan perkebunan dengan sistem distribusi produksinya memegang peranan penting, semua bangunan pemerintahan seperti kantor Asisten Residen, kantor Bupati, penjara, serta bangunan keagamaan, seperti masjid dan gereja diletakkan menyesuaikan dengan posisi alun-alun kota. Penataan ini difungsikan untuk mempermudah kontrol pemerintahan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat pribumi.

Posisi penempatan dari kantor Bakorwil Madiun (eks kantor Asisten Residen Madiun) dan kantor Balai Kota Madiun terhadap posisi kantor Kabupaten Madiun atau rumah dinas Bupati Madiun serta kedudukan alun-alun di Kota Madiun lebih mencerminkan pola “*Nieuwe Indische Stad*”, adapun kediaman Asisten Residen Madiun (*Asistent Resident Huis*) dan Balai Kota Madiun (*RaadHuis te Madioen*) merupakan dua contoh tipe bangunan pusat pemerintahan yang memegang peranan penting bagi pemerintah kolonial Belanda dalam memusatkan kontrol pemerintahan terhadap masyarakat Madiun terlepas dari peranan Bupati.



**Gambar 1.1** Raadhuis te Madioen 1930

(Sumber: Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun)

Kantor Balai Kota Madiun adalah tipe bangunan pemerintahan baru yang dibangun pada akhir periode 1920-an, setelah ditetapkannya undang-undang desentralisasi *Inlandsche Gementee Ordonantie* oleh Departemen *Binnenlandsch* yang menetapkan status berdirinya Pemerintah Kotapraja Madiun (*Staadsgementee Madioen*) pada tanggal 20 Juni 1918. Dengan demikian, pasca pengaplikasian undang-undang tersebut, pemerintahan Kotapraja secara resmi terpisah dengan pemerintahan Kabupaten serta status jabatan Walikota pada pemerintahan Kotapraja Madiun tidak lagi dirangkap oleh Asisten Residen melainkan dijabat secara langsung oleh Walikota. Lokasi bangunan ini berada pada jalan *Residentlaan* yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Pahlawan dan bangunan ini merupakan karya rancangan dari biro konsultan arsitektur Fermont dan Eduard Cuypers yang pembangunannya dimulai pada tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1930.

Bangunan Balai Kota Madiun dibangun dan diresmikan pada masa pemerintahan *Burgemeester*/Walikota Mr. K.A. Schotman, serta merupakan salah satu bagian dari mega proyek BOW/*Burgelijke Openbare Werken* (Dinas Pekerjaan Umum) pada masa itu. Karakteristik secara umum yang terlihat dari bangunan ini adalah pengaplikasian langgam arsitektur kolonial Belanda era 1920-1940 pada detail bangunannya, penempatan *tower* pada area bangunan yang berdekatan dengan pintu masuk dan difungsikan sebagai area pengawasan atau pertahanan, mirip dengan ciri arsitektur tipe peralihan pada masa kolonial Belanda di Indonesia, denah yang menerapkan posisi koridor jalan/*galerij* di sekeliling bangunan, menara pengawas dengan hiasan khas pada bagian puncak *tower* tersebut, dan peletakan susunan massa bangunan yang masif secara simetris.

Dengan adanya ciri-ciri tersebut maka perlu ada suatu pengkajian yang komprehensif terhadap bangunan ini dikarenakan bangunan ini tampil sebagai bangunan pusat pemerintahan dan memiliki karakter visual yang unik, berbeda, apabila dibandingkan dengan bangunan lainnya yang berada pada kawasan tersebut. Selain itu, selama ini belum pernah dilakukan sebuah kajian penelitian mengenai analisis karakteristik spasial maupun kajian detail karakteristik visual bangunan dari Balai Kota Madiun ini sehingga diharapkan nantinya dengan penelitian mengenai Balai Kota Madiun ini mampu menambah khasanah pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Kota Madiun pada umumnya dan bagi *civitas academica* pada khususnya, mengenai kondisi bangunan bersejarah di Kota Madiun.

### **1.1.2 Gedung Balai Kota Madiun sebagai aset bersejarah**

Ketika Kota Madiun telah mengalami perkembangan dari segi infrastruktur bangunan dan kawasan yang semakin menyesuaikan diri sebagai kota dengan identitas kota *modern*, lambat laun kondisi bangunan kuno dan bersejarah di Kota Madiun semakin diabaikan dan kurang mendapat perhatian serta perawatan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun. Bangunan bersejarah tersebut banyak mengalami kerusakan dan penurunan kualitas *visual* bangunan. Keberadaan bangunan bersejarah dengan arsitektur kolonial Belanda dikesampingkan keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada saat ini sehingga berdampak pada rusak dan tidak terawatnya kondisi bangunan bersejarah ataupun dalam suatu kondisi tertentu telah mengalami renovasi yang berakibat pada perubahan total fasad bangunannya akibat modernisasi bangunan tua tersebut. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi pada bangunan Balai Kota Madiun, mengingat berdasarkan data dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun pada tahun 2016, di eks-Karesidenan Madiun objek bernilai sejarah yang diakui sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan Jawa Timur hanya empat saja, yaitu makam dan Masjid Kuno Kuncen serta makam dan Masjid Kuno Taman.

Hal tersebut cukup ironis mengingat banyak sekali bangunan kuno dan bersejarah yang terdapat di Kota Madiun yang tidak dikategorikan ke dalam cagar budaya yang dilindungi. Balai Kota Madiun sebagai pusat pemerintahan di Kota Madiun pun tidak masuk ke dalam kategori bangunan cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, sehingga cukup membahayakan kondisi bangunan apabila mengalami kerusakan mengingat tidak ada upaya untuk menjaga dan mempertahankan kualitas visual serta spasial bangunan seperti kondisi awal saat dibangun di era kolonial Belanda. Pada saat

ini, bangunan Balai Kota Madiun difungsikan sebagai kantor Walikota Madiun sesuai dengan fungsi awal ketika dipergunakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengingat kepemilikan berada di tangan pemerintah, kondisi bangunan ini cukup terawat dengan beberapa perbaikan pada arsitektur bangunan dan penambahan kompleks perkantoran menjadi 2 lantai pada sisi timur dari bangunan asli. Walaupun perubahan yang dialami masih berada dalam batas yang wajar tetapi cukup mempengaruhi dan merusak kualitas visual dan spasial yang sangat berpengaruh terhadap citra bangunan pada kawasan tersebut. Perubahan itu diantaranya tidak seimbang antara fasade asli dengan fasade yang telah mengalami pembongkaran dan tidak adanya kesatuan (*unity*) fasade bangunan utama yang masih dijaga keasliannya dengan bangunan yang telah mengalami renovasi tersebut.

Secara umum, kepentingan yang muncul dari pengkajian secara detail tentang karakteristik spasial dan visual bangunan Balai Kota Madiun adalah sebagai alternatif dalam menetapkan acuan pembangunan apabila ke depannya terdapat upaya pengembangan bangunan Balai Kota Madiun sehingga tetap menjaga kelestarian kaidah arsitektural sesuai penataan oleh Arsitek Fermont dan Eduard Cuypers, selain itu juga sebagai salah satu langkah awal dalam menjaga keaslian bangunan Balai Kota Madiun sebelum ditingkatkan ke arah konservasi oleh akademisi ataupun peneliti independen tertentu.

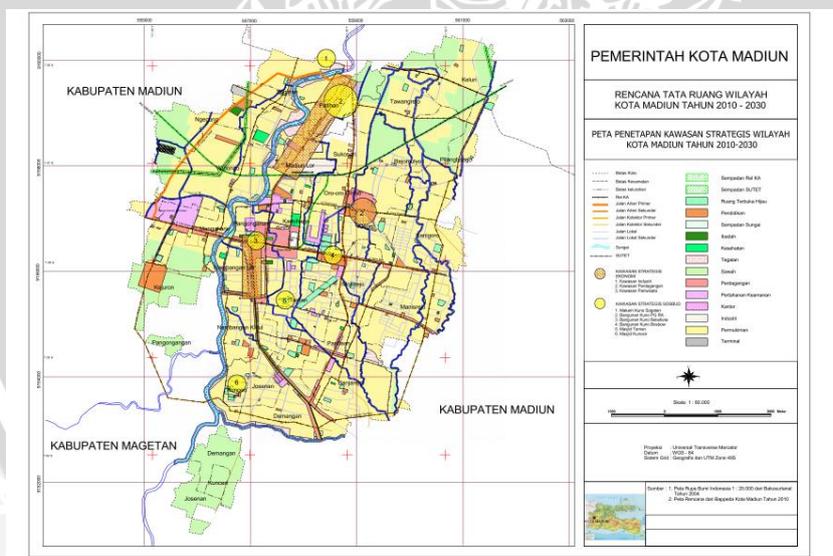
Terdapat berbagai alasan penting yang melatarbelakangi pengkajian karakteristik spasial dan visual Balai Kota Madiun, alasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bangunan pemerintahan Balai Kota Madiun merupakan bangunan bersejarah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun oleh biro konsultan arsitektur Fermont dan Eduard Cuypers yang proses pembangunannya dimulai pada tahun 1928 dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1930. Sehingga diperlukan upaya mengkaji karakteristik spasial dan visual bangunan Balai Kota Madiun sebagai upaya menghargai sejarah bangunan.
2. Fungsi bangunan yang masih sama sebagai kantor pusat pemerintahan Kotamadya Madiun, sesuai dengan peruntukan awalnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda.
3. Sebagai upaya pendongkrak wisata dengan tujuan objek bangunan bersejarah di Kota Madiun sehingga mampu meningkatkan kualitas visual kawasan dan meningkatkan devisa daerah Kota Madiun.
4. Bangunan Balai Kota Madiun berada di kawasan Jalan Pahlawan yang strategis di pusat kota dan terdapat banyak sekali bangunan bersejarah peninggalan

kolonial Belanda dengan skala besar serta bisa dimaksimalkan untuk menciptakan *image* tersendiri bagi kawasan Kota Madiun.

Banyak sekali ditemui bangunan bersejarah peninggalan pemerintahan kolonial Belanda di koridor Jalan Pahlawan ini, hal tersebut dikarenakan Jalan Pahlawan/*Residentlaan* merupakan salah satu koridor jalan utama yang dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan pada masa kolonial, sehingga memerlukan tindakan penyelamatan terutama bagi aset-aset bersejarah yang ada di kawasan ini. Menurut dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030, terdapat beberapa bangunan bersejarah era kolonial Belanda yang masih bertahan dan terdapat di koridor jalan Pahlawan ini selain Balai Kota Madiun, diantaranya adalah:

1. Kompleks Gereja Katolik Santo Cornelius;
2. Susteran Ursulin (*Saint Ursula Monastic Order*);
3. Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Jawa Timur;
4. Kantor Kodim 0803 Kota Madiun;
5. Kompleks pertokoan di sepanjang Jalan Pahlawan;



**Gambar 1.2** Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030

(Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun tahun 2011)

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa identifikasi permasalahan pada penelitian karakteristik spasial dan visual bangunan kolonial Balai Kota Madiun yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan, yaitu:

1. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkembangan arsitektur kolonial Belanda sangat pesat di Jalan *Residentlaan* sebagai pusat pemerintahan desentralisasi Kotapraja Madiun pada masa itu. Balai Kota Madiun adalah salah satu implikasi dari perkembangan tersebut dan didesain dengan memiliki ciri khas unik/pembeda oleh Biro Arsitek kolonial Belanda Fermont dan Eduard Cuypers.
2. Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan obyek bangunan Balai Kota Madiun sebagai cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun untuk periode waktu 2010-2030 melalui Peraturan Daerah Kota Madiun tahun 2011, tetapi hanya sebatas wacana dan hingga saat ini belum ada realisasi tentang penanganan bangunan bersejarah ini.
3. Telah terjadi penurunan kualitas arsitektural pada Balai Kota Madiun yang teridentifikasi melalui penambahan sekat ruang permanen dan semi permanen di seluruh sisi bangunan yang berpotensi merubah penataan spasial awal khas era kolonial Belanda disertai dengan adanya pengembangan pembangunan melalui renovasi yang mengakibatkan perubahan fisik bangunan secara menyeluruh di sisi timur bangunan Balai Kota Madiun dengan penambahan lantai dua untuk menyesuaikan fungsi bangunan baru, menandakan belum adanya upaya serius untuk mempertahankan kondisi asli arsitektur kolonial Belanda pada Balai Kota Madiun sehingga diperlukan strategi awal dalam upaya menjaga keterawatan bangunan tersebut dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik spasial serta visual bangunan asli yang tersisa melalui ranah penelitian akademik.
4. Bangunan utama dari Balai Kota Madiun memiliki potensi untuk selanjutnya ditingkatkan ke upaya konservasi, sehingga diawali dengan diberlakukannya pengkajian karakter spasial dan visual dalam menganalisis tingkat keaslian kondisi bangunan serta mengidentifikasi langgam khas arsitektur kolonial Belanda pada bangunan tersebut di kajian penelitian ini.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah mengenai kajian penelitian terhadap bangunan kolonial Balai Kota Madiun, maka fokus rumusan permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana karakter spasial dan karakter visual bangunan Balai Kota Madiun?

#### 1.4 Batasan Masalah

Upaya identifikasi karakteristik spasial dan visual bangunan kolonial Belanda Balai Kota Madiun mempunyai beberapa batasan permasalahan yang harus dikaji, yaitu:

1. Penelitian ini melingkupi aspek identifikasi dan analisis karakteristik bangunan pada kompleks Kantor Walikota Madiun (*Eks Raadhuis te Madioen*) yang ditinjau dari aspek karakter spasial dan karakter visual bangunan keseluruhan bangunan ini dan dikaitkan dengan karakter bangunan kolonial Belanda khas karya Biro Arsitek Fermont dan Eduard Cuypers secara umum. Karakter spasial secara garis besar memfokuskan pembahasan pada detail denah dari tiap massa bangunan dan karakter visual lebih memfokuskan pada pembahasan elemen pembentuk fasade bangunan serta elemen ruang dalam secara keseluruhan.
  - a) Karakter spasial bangunan dibagi menjadi lima aspek yang dibahas, yaitu:
    - Fungsi ruang/bangunan;
    - Hubungan ruang;
    - Organisasi ruang;
    - Sirkulasi ruang/kawasan;
    - Orientasi ruang/bangunan.
  - b) Karakter visual bangunan yang terbagi menjadi berbagai aspek, yaitu:
    - Elemen pembentuk fasade dan elemen ruang dalam bangunan yang terdiri atas atap, dinding eksterior, dinding interior, kolom, pintu, jendela, ventilasi, dan lantai bangunan.
2. Balai Kota Madiun adalah bangunan yang masuk dalam klasifikasi cagar budaya yaitu memiliki kriteria usia diatas 50 tahun dan masih mempertahankan tampilan fasade asli dengan fungsi asli yang tetap dipertahankan seperti sediakala (termaktub dalam Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang Bangunan Cagar Budaya).

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari identifikasi karakter spasial dan karakter visual bangunan kolonial Balai Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami secara terstruktur karakteristik spasial dan visual yang terbentuk pada bangunan Balai Kota Madiun.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai identifikasi karakter spasial dan visual bangunan kolonial Balai Kota Madiun adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Terhadap Akademisi**

Menambah referensi dalam pemahaman mengenai sejarah berdirinya Balai Kota Madiun dan sebagai pedoman dalam mempelajari karakteristik spasial dan visual Balai Kota Madiun serta dalam mengidentifikasi ciri khas karya Fermont dan Eduard Cuypers pada bangunan tersebut.

### **1.6.2 Terhadap Masyarakat**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pemberi informasi bagi masyarakat Kota Madiun mengenai pembahasan karakteristik spasial dan visual dari bangunan kolonial Belanda Balai Kota Madiun serta membangun kesadaran masyarakat dalam mengapresiasi nilai historis dari sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda, sehingga memunculkan keinginan dan motivasi bagi masyarakat untuk berinisiatif menjaga dan mengapresiasi.

### **1.6.3 Terhadap Pemerintah**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai arsip, dokumentasi, ataupun catatan tertulis yang memberi sedikit informasi terhadap kondisi dan karakter arsitektural berupa spasial serta visual khas kolonial Belanda pada Balai Kota Madiun untuk dipublikasikan secara luas kepada masyarakat umum ataupun sebagai pedoman pengikat dalam pembangunan Balai Kota Madiun ke depannya yang mampu memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah untuk menjadikan bangunan kolonial Belanda sebagai salah satu bangunan yang berpotensi menjadi aset wisata bersejarah.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Karakter Spasial dan Visual Bangunan Kolonial Belanda Balai Kota Madiun” adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang penelitian tentang Balai Kota Madiun, memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi akademisi, masyarakat, dan pemerintah.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan panduan/referensi yang menjadi dasar teori dalam proses analisis dan evaluasi penulisan skripsi. Teori berupa identifikasi karakteristik arsitektur secara umum, karakteristik arsitektur kolonial Belanda beserta perkembangannya pada era 1920-1940-an, pembahasan mengenai studi terdahulu tentang pembahasan karakteristik spasial dan visual bangunan kolonial yang identik dengan objek bangunan Balai Kota Madiun.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan yang diaplikasikan sebagai langkah untuk menyelesaikan prosedur penelitian beserta dengan bagan alir tahapan penyelesaian penelitian. Pada tahap ini, tata urutan melingkupi pemilihan jenis metode penelitian, objek, lokasi, instrument pengumpulan data, dan metode dalam menganalisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

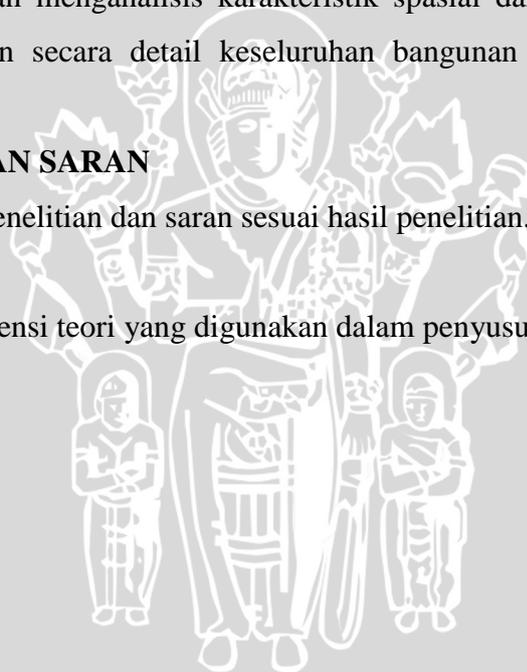
Bab ini mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik spasial dan karakteristik visual bangunan yang menjelaskan secara detail keseluruhan bangunan kolonial Balai Kota Madiun.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

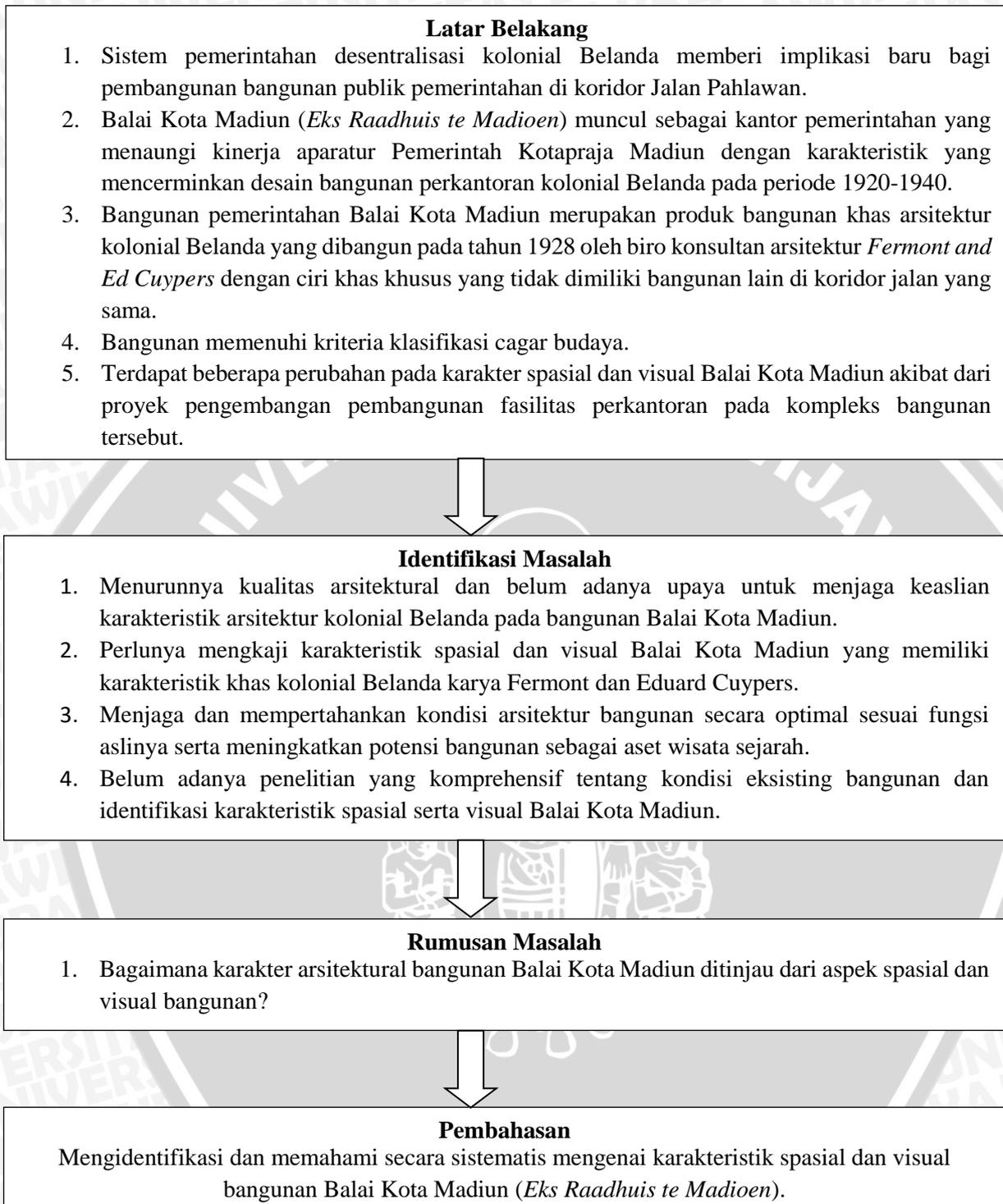
Berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran sesuai hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi tentang berbagai referensi teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## 1.8 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.3** Bagan Kerangka Pemikiran